



**SALINAN**

BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENETAPAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengatur Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 10/A);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 89/E);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 118/E);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 114 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 114/A);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PENETAPAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan selanjutnya disebut dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa adalah laporan pertanggungjawaban keuangan Desa yang terdiri dari pertanggungjawaban pendapatan, belanja dan pembiayaan.
18. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut dengan Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, pelatihan dan konsultasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, pembinaan kemasyarakatan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

### Pasal 3

Tujuan Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. meningkatkan pembinaan kemasyarakatan;
- d. meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;

- e. memfasilitasi penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

### BAB III

#### PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

##### Pasal 4

- (1) Pengelolaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Pengelolaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menggunakan prinsip transparan, adil, efisien, efektif, akuntabel, terukur dan terkendali serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

##### Pasal 5

- (1) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:
  - a. pengalokasian bagian dari Hasil Pajak Daerah; dan
  - b. pengalokasian bagian dari Hasil Retribusi Daerah.

##### Pasal 6

- (1) Pengalokasian Bagian dari hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan ketentuan :
  - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.

- (2) Ketentuan penghitungan bagian dari hasil Pajak Daerah untuk setiap Desa dengan rumus :

$$\text{BHPjk per Desa} = \text{AD} + \text{AF}$$

Keterangan :

BHPjk per Desa = Bagi Hasil Pajak per desa

AD = Alokasi Dasar

AF = Alokasi Formula

- (3) Alokasi dasar dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dibagi secara merata sejumlah Desa dengan rumusan :

$$\frac{60\% \times \text{Pagu Pajak Kabupaten Tahun 2022}}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

- (4) Alokasi Formula dihitung sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan Pajak Daerah dari masing masing Desa dibagi total pemasukan Pajak Daerah se-Kabupaten Jombang.

$$40\% \times \text{Pagu Pajak Kabupaten 2024} \times \frac{\text{Jumlah kontribusi Pajak dari Desa 2022}}{\text{Total Pemasukan Pajak Se-Kabupaten}}$$

- (5) Pengalokasian Bagian dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dihitung dengan ketentuan:

$$\text{Alokasi Retribusi per Desa} = \frac{\text{Pagu Retribusi Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten Jombang}}$$

- (6) Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PENGANGGARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Penganggaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dialokasikan dalam APB Desa.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa, yang meliputi bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - 1) pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan BPD;
  - 2) insentif Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - 3) insentif Purna Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Pembinaan kemasyarakatan Desa antara lain:
  - 1) Pembinaan karang Taruna;
  - 2) Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
  - 3) Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
  - 4) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
  - 5) Pembinaan Lembaga Adat Desa; dan
  - 6) kegiatan Pembinaan kemasyarakatan lainnya yang diputuskan dalam Musdes dan sesuai dengan kewenangan Desa;
- c. Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain :
  - 1) pemberian insentif bagi penjaga makam;
  - 2) pemberian insentif guru Taman Pendidikan Qur'an (TPQ);
  - 3) operasional Majelis Ta'lim; dan
  - 4) kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang diputuskan dalam Musdes dan sesuai dengan kewenangan Desa.

BAB VII  
TAHAPAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa dilaksanakan 1 (satu) tahap dan paling cepat dilaksanakan pada bulan Januari tahun anggaran berjalan.

## BAB VIII

MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

## Pasal 10

Mekanisme pengajuan pencairan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan berkas usulan pencairan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
  - 1) Usulan Kepala desa kepada Bupati melalui Camat;
  - 2) Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah di evaluasi oleh Camat dan ditetapkan oleh Kepala Desa;
  - 3) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Sebelumnya;
  - 4) Rencana penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - 5) Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 6) Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
  - 7) Fotocopy Nomor Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
  - 8) Pakta Integritas dari Kepala Desa bermeterai; dan
  - 9) Kuitansi/bukti penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bermaterai.
- b. Camat melakukan verifikasi terhadap persyaratan berkas penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Camat mengajukan rekap persyaratan penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b ke Badan.

## BAB IX

MEKANISME PENARIKAN ANGGARAN BAGIAN DARI HASIL  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

## Pasal 11

- (1) Penarikan Anggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di bank dilengkapi dengan:
  - a. Form Penarikan; dan
  - b. Surat Pengantar Camat.
- (2) Penarikan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Desa.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dinas melaksanakan Pembinaan terhadap penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di tingkat Kabupaten.
- (2) Pembinaan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyusun pedoman dan memberikan bimbingan, supervisi, konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pembinaan penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Pembina tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
  - d. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XI  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 2 Januari 2024  
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

SUGIAT

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 2 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 6/E



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG  
 NOMOR : 6 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2024

**BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
 KEPADA DESA TAHUN 2024**

No	KECAMATAN	DESA	PEROLEHAN PAJAK FINAL (Rp)	PEROLEHAN RETRIBUSI FINAL (Rp)	TOTAL BAGI HASIL PDRD 2024 (Rp)
1	PERAK	JATIGANGGONG	59,215,000.00	6,660,000.00	65,875,000.00
2	PERAK	KEPUHKAJANG	75,507,000.00	8,492,000.00	83,999,000.00
3	PERAK	SUMBERAGUNG	61,266,000.00	6,891,000.00	68,157,000.00
4	PERAK	PAGERWOJO	66,247,000.00	7,451,000.00	73,698,000.00
5	PERAK	PERAK	59,825,000.00	6,729,000.00	66,554,000.00
6	PERAK	SEMBUNG	57,176,000.00	6,431,000.00	63,607,000.00
7	PERAK	GLAGAHAN	62,195,000.00	6,995,000.00	69,190,000.00
8	PERAK	KALANG SEMANDING	59,969,000.00	6,745,000.00	66,714,000.00
9	PERAK	GADINGMANGU	63,198,000.00	7,108,000.00	70,306,000.00
10	PERAK	PLOSOGENUK	60,248,000.00	6,776,000.00	67,024,000.00
11	PERAK	SUKOREJO	69,523,000.00	7,819,000.00	77,342,000.00
12	PERAK	TEMUWULAN	57,189,000.00	6,432,000.00	63,621,000.00
13	PERAK	CANGKRINGRANDU	69,571,000.00	7,825,000.00	77,396,000.00
14	GUDO	PUCANGRO	75,619,000.00	8,505,000.00	84,124,000.00
15	GUDO	KEDUNGTURI	59,934,000.00	6,741,000.00	66,675,000.00
16	GUDO	JAPANAN	47,508,000.00	5,343,000.00	52,851,000.00
17	GUDO	BLIMBING	50,207,000.00	5,647,000.00	55,854,000.00
18	GUDO	MENTAOS	54,128,000.00	6,088,000.00	60,216,000.00
19	GUDO	SUKOIBER	67,139,000.00	7,551,000.00	74,690,000.00
20	GUDO	SUKOPINGGIR	59,163,000.00	6,654,000.00	65,817,000.00
21	GUDO	BUGASURKEDALEMAN	66,556,000.00	7,486,000.00	74,042,000.00
22	GUDO	GUDO	50,585,000.00	5,689,000.00	56,274,000.00
23	GUDO	PESANGGRAHAN	53,477,000.00	6,015,000.00	59,492,000.00
24	GUDO	WANGKALKEPUH	50,746,000.00	5,707,000.00	56,453,000.00
25	GUDO	KREMBANGAN	67,291,000.00	7,568,000.00	74,859,000.00
26	GUDO	SEPANYUL	64,645,000.00	7,271,000.00	71,916,000.00
27	GUDO	GODONG	62,639,000.00	7,045,000.00	69,684,000.00
28	GUDO	MEJOYOSARI	55,961,000.00	6,294,000.00	62,255,000.00
29	GUDO	PLUMBONGAMBANG	63,246,000.00	7,113,000.00	70,359,000.00
30	GUDO	GEMPOLLEGUNDI	63,504,000.00	7,142,000.00	70,646,000.00
31	GUDO	TANGGUNGAN	63,843,000.00	7,180,000.00	71,023,000.00
32	NGORO	JOMBOK	65,704,000.00	7,390,000.00	73,094,000.00
33	NGORO	GENUKWATU	68,556,000.00	7,711,000.00	76,267,000.00
34	NGORO	REJOAGUNG	75,927,000.00	8,540,000.00	84,467,000.00
35	NGORO	KAUMAN	57,001,000.00	6,411,000.00	63,412,000.00
36	NGORO	NGORO	68,854,000.00	7,744,000.00	76,598,000.00
37	NGORO	BADANG	68,278,000.00	7,679,000.00	75,957,000.00
38	NGORO	PULOREJO	81,158,000.00	9,128,000.00	90,286,000.00
39	NGORO	BANYUARANG	68,102,000.00	7,660,000.00	75,762,000.00
40	NGORO	SIDOWAREK	74,548,000.00	8,384,000.00	82,932,000.00
41	NGORO	GAJAH	66,646,000.00	7,496,000.00	74,142,000.00
42	NGORO	KESAMBEN	62,939,000.00	7,079,000.00	70,018,000.00
43	NGORO	KERTOREJO	63,191,000.00	7,107,000.00	70,298,000.00
44	NGORO	SUGIHWARAS	66,256,000.00	7,452,000.00	73,708,000.00

45	BARENG	KEBONDALEM	63,477,000.00	7,139,000.00	70,616,000.00
46	BARENG	MUNDUSEWU	64,109,000.00	7,211,000.00	71,320,000.00
47	BARENG	PAKEL	59,452,000.00	6,687,000.00	66,139,000.00
48	BARENG	KARANGAN	65,707,000.00	7,390,000.00	73,097,000.00
49	BARENG	NGAMPUNGAN	62,643,000.00	7,046,000.00	69,689,000.00
50	BARENG	JENISGELARAN	66,949,000.00	7,530,000.00	74,479,000.00
51	BARENG	BARENG	98,613,000.00	11,091,000.00	109,704,000.00
52	BARENG	TEBEL	56,977,000.00	6,408,000.00	63,385,000.00
53	BARENG	MOJOTENGAH	59,000,000.00	6,636,000.00	65,636,000.00
54	BARENG	BANJARAGUNG	73,392,000.00	8,255,000.00	81,647,000.00
55	BARENG	NGLEBAK	63,362,000.00	7,126,000.00	70,488,000.00
56	BARENG	NGRIMBI	63,500,000.00	7,142,000.00	70,642,000.00
57	BARENG	PULOSARI	71,288,000.00	8,018,000.00	79,306,000.00
58	WONOSALAM	GALENGDOWO	56,727,000.00	6,380,000.00	63,107,000.00
59	WONOSALAM	WONOMERTO	51,905,000.00	5,838,000.00	57,743,000.00
60	WONOSALAM	JARAK	61,109,000.00	6,873,000.00	67,982,000.00
61	WONOSALAM	SAMBIREJO	55,366,000.00	6,227,000.00	61,593,000.00
62	WONOSALAM	WONOSALAM	86,368,000.00	9,714,000.00	96,082,000.00
63	WONOSALAM	CARANGWULUNG	67,670,000.00	7,611,000.00	75,281,000.00
64	WONOSALAM	WONOKERTO	50,113,000.00	5,636,000.00	55,749,000.00
65	WONOSALAM	SUMBERJO	57,513,000.00	6,468,000.00	63,981,000.00
66	WONOSALAM	PANGLUNGAN	56,152,000.00	6,316,000.00	62,468,000.00
67	MOJOAGUNG	KEDUNGLUMPANG	60,064,000.00	6,756,000.00	66,820,000.00
68	MOJOAGUNG	DUKUHMOJO	74,859,000.00	8,420,000.00	83,279,000.00
69	MOJOAGUNG	KARANGWINONGAN	57,266,000.00	6,441,000.00	63,707,000.00
70	MOJOAGUNG	KADEMANGAN	64,314,000.00	7,234,000.00	71,548,000.00
71	MOJOAGUNG	JANTI	53,386,000.00	6,004,000.00	59,390,000.00
72	MOJOAGUNG	TEJO	71,166,000.00	8,004,000.00	79,170,000.00
73	MOJOAGUNG	GAMBIAN	49,856,000.00	5,607,000.00	55,463,000.00
74	MOJOAGUNG	KAUMAN	42,889,000.00	4,824,000.00	47,713,000.00
75	MOJOAGUNG	MOJOTRISNO	57,178,000.00	6,431,000.00	63,609,000.00
76	MOJOAGUNG	TANGGALREJO	65,417,000.00	7,358,000.00	72,775,000.00
77	MOJOAGUNG	DUKUHDIMORO	62,645,000.00	7,046,000.00	69,691,000.00
78	MOJOAGUNG	MIAGAN	52,312,000.00	5,884,000.00	58,196,000.00
79	MOJOAGUNG	MANCILAN	71,305,000.00	8,020,000.00	79,325,000.00
80	MOJOAGUNG	BETEK	66,032,000.00	7,427,000.00	73,459,000.00
81	MOJOAGUNG	KAROBELAH	59,933,000.00	6,741,000.00	66,674,000.00
82	MOJOAGUNG	MURUKAN	56,199,000.00	6,321,000.00	62,520,000.00
83	MOJOAGUNG	JOHOWINONG	63,612,000.00	7,155,000.00	70,767,000.00
84	MOJOAGUNG	SEKETI	41,143,000.00	4,627,000.00	45,770,000.00
85	MOJOWARNO	KEDUNGPARI	61,931,000.00	6,966,000.00	68,897,000.00
86	MOJOWARNO	KARANGLO	58,646,000.00	6,596,000.00	65,242,000.00
87	MOJOWARNO	LATSARI	51,582,000.00	5,802,000.00	57,384,000.00
88	MOJOWARNO	MOJOWARNO	57,152,000.00	6,428,000.00	63,580,000.00
89	MOJOWARNO	PENGGARON	51,444,000.00	5,786,000.00	57,230,000.00
90	MOJOWARNO	MOJODUWUR	60,113,000.00	6,761,000.00	66,874,000.00
91	MOJOWARNO	MOJOWANGI	56,856,000.00	6,395,000.00	63,251,000.00
92	MOJOWARNO	GONDEK	61,336,000.00	6,899,000.00	68,235,000.00
93	MOJOWARNO	GEDANGAN	52,189,000.00	5,870,000.00	58,059,000.00
94	MOJOWARNO	MOJOJEJER	52,776,000.00	5,936,000.00	58,712,000.00
95	MOJOWARNO	JAPANAN	60,618,000.00	6,818,000.00	67,436,000.00
96	MOJOWARNO	MENGANTO	55,171,000.00	6,205,000.00	61,376,000.00
97	MOJOWARNO	GROBOGAN	58,663,000.00	6,598,000.00	65,261,000.00

98	MOJOWARNO	REJOSLAMET	54,103,000.00	6,085,000.00	60,188,000.00
99	MOJOWARNO	SELOREJO	51,991,000.00	5,847,000.00	57,838,000.00
100	MOJOWARNO	SIDOKERTO	59,144,000.00	6,652,000.00	65,796,000.00
101	MOJOWARNO	SUKOMULYO	48,186,000.00	5,420,000.00	53,606,000.00
102	MOJOWARNO	CATAKGAYAM	66,898,000.00	7,524,000.00	74,422,000.00
103	MOJOWARNO	WRINGINPITU	55,948,000.00	6,293,000.00	62,241,000.00
104	DIWEK	KAYANGAN	66,267,000.00	7,453,000.00	73,720,000.00
105	DIWEK	PUTON	55,149,000.00	6,203,000.00	61,352,000.00
106	DIWEK	BENDET	51,057,000.00	5,742,000.00	56,799,000.00
107	DIWEK	BULUREJO	71,818,000.00	8,077,000.00	79,895,000.00
108	DIWEK	GROGOL	75,256,000.00	8,464,000.00	83,720,000.00
109	DIWEK	JATIREJO	58,382,000.00	6,566,000.00	64,948,000.00
110	DIWEK	CUKIR	71,511,000.00	8,043,000.00	79,554,000.00
111	DIWEK	KWARON	63,790,000.00	7,175,000.00	70,965,000.00
112	DIWEK	WATUGALUH	56,664,000.00	6,373,000.00	63,037,000.00
113	DIWEK	PUNDONG	67,053,000.00	7,542,000.00	74,595,000.00
114	DIWEK	DIWEK	52,212,000.00	5,872,000.00	58,084,000.00
115	DIWEK	BANDUNG	79,583,000.00	8,951,000.00	88,534,000.00
116	DIWEK	KEDAWONG	50,566,000.00	5,687,000.00	56,253,000.00
117	DIWEK	NGUDIREJO	58,302,000.00	6,557,000.00	64,859,000.00
118	DIWEK	CEWENG	60,186,000.00	6,769,000.00	66,955,000.00
119	DIWEK	BALONGBESUK	62,387,000.00	7,017,000.00	69,404,000.00
120	DIWEK	PANDANWANGI	72,557,000.00	8,161,000.00	80,718,000.00
121	DIWEK	BRAMBANG	49,528,000.00	5,570,000.00	55,098,000.00
122	DIWEK	JATIPELEM	54,978,000.00	6,183,000.00	61,161,000.00
123	DIWEK	KERAS	75,355,000.00	8,475,000.00	83,830,000.00
124	JOMBANG	MOJONGAPIT	61,464,000.00	6,913,000.00	68,377,000.00
125	JOMBANG	PLANDI	74,911,000.00	8,425,000.00	83,336,000.00
126	JOMBANG	KEPATIHAN	65,443,000.00	7,361,000.00	72,804,000.00
127	JOMBANG	PULOLOR	71,519,000.00	8,044,000.00	79,563,000.00
128	JOMBANG	SENGON	82,254,000.00	9,251,000.00	91,505,000.00
129	JOMBANG	TUNGGORONO	77,864,000.00	8,805,000.00	86,669,000.00
130	JOMBANG	DENANYAR	96,182,000.00	10,818,000.00	107,000,000.00
131	JOMBANG	JOMBANG	87,336,000.00	9,823,000.00	97,159,000.00
132	JOMBANG	CANDIMULYO	76,339,000.00	8,586,000.00	84,925,000.00
133	JOMBANG	TAMBAKREJO	55,278,000.00	6,217,000.00	61,495,000.00
134	JOMBANG	BANJARDOWO	64,154,000.00	7,215,000.00	71,369,000.00
135	JOMBANG	SAMBONGDUKUH	86,046,000.00	9,678,000.00	95,724,000.00
136	JOMBANG	DAPURKEJAMBON	54,866,000.00	6,171,000.00	61,037,000.00
137	JOMBANG	JABON	59,276,000.00	6,667,000.00	65,943,000.00
138	JOMBANG	PLOSOGENENG	67,600,000.00	7,603,000.00	75,203,000.00
139	JOMBANG	SUMBERJO	45,234,000.00	5,088,000.00	50,322,000.00
140	PETERONGAN	PETERONGAN	49,966,000.00	5,620,000.00	55,586,000.00
141	PETERONGAN	KEPLAKSARI	52,251,000.00	5,877,000.00	58,128,000.00
142	PETERONGAN	KEPUHKEMBENG	62,454,000.00	7,024,000.00	69,478,000.00
143	PETERONGAN	MANCAR	56,779,000.00	6,386,000.00	63,165,000.00
144	PETERONGAN	TUGUSUMBERJO	65,505,000.00	7,367,000.00	72,872,000.00
145	PETERONGAN	MOROSUNGGINGAN	54,841,000.00	6,168,000.00	61,009,000.00
146	PETERONGAN	KEBONTEMU	47,623,000.00	5,356,000.00	52,979,000.00
147	PETERONGAN	DUKUHKLOPO	57,692,000.00	6,489,000.00	64,181,000.00
148	PETERONGAN	TANJUNGGUNUNG	52,621,000.00	5,918,000.00	58,539,000.00
149	PETERONGAN	BONGKOT	56,084,000.00	6,308,000.00	62,392,000.00
150	PETERONGAN	SENDEN	48,243,000.00	5,426,000.00	53,669,000.00

151	PETERONGAN	NGRANDULOR	59,085,000.00	6,645,000.00	65,730,000.00
152	PETERONGAN	TENGARAN	54,322,000.00	6,110,000.00	60,432,000.00
153	PETERONGAN	SUMBERAGUNG	49,835,000.00	5,605,000.00	55,440,000.00
154	SUMOBITO	PLOSOKEREP	63,980,000.00	7,196,000.00	71,176,000.00
155	SUMOBITO	JOGOLOYO	68,352,000.00	7,688,000.00	76,040,000.00
156	SUMOBITO	PALREJO	68,664,000.00	7,723,000.00	76,387,000.00
157	SUMOBITO	PLEMAHAN	69,386,000.00	7,804,000.00	77,190,000.00
158	SUMOBITO	BRUDU	70,327,000.00	7,910,000.00	78,237,000.00
159	SUMOBITO	BADAS	67,123,000.00	7,549,000.00	74,672,000.00
160	SUMOBITO	NGLELE	55,602,000.00	6,254,000.00	61,856,000.00
161	SUMOBITO	TRAWASAN	58,006,000.00	6,524,000.00	64,530,000.00
162	SUMOBITO	SEBANI	61,218,000.00	6,885,000.00	68,103,000.00
163	SUMOBITO	MLARAS	60,861,000.00	6,845,000.00	67,706,000.00
164	SUMOBITO	SEGODOREJO	62,683,000.00	7,050,000.00	69,733,000.00
165	SUMOBITO	KEDUNG PAPAR	64,577,000.00	7,263,000.00	71,840,000.00
166	SUMOBITO	SUMOBITO	59,718,000.00	6,717,000.00	66,435,000.00
167	SUMOBITO	CURAHMALANG	85,381,000.00	9,603,000.00	94,984,000.00
168	SUMOBITO	BUDUG SIDOREJO	69,064,000.00	7,768,000.00	76,832,000.00
169	SUMOBITO	KENDALSARI	69,514,000.00	7,818,000.00	77,332,000.00
170	SUMOBITO	TALUNKIDUL	55,494,000.00	6,241,000.00	61,735,000.00
171	SUMOBITO	MADIOPURO	55,192,000.00	6,208,000.00	61,400,000.00
172	SUMOBITO	BAKALAN	52,997,000.00	5,961,000.00	58,958,000.00
173	SUMOBITO	GEDANGAN	62,290,000.00	7,006,000.00	69,296,000.00
174	SUMOBITO	MENTURO	62,735,000.00	7,056,000.00	69,791,000.00
175	KESAMBEN	KEDUNGBETIK	74,951,000.00	8,430,000.00	83,381,000.00
176	KESAMBEN	KEDUNGMLATI	59,864,000.00	6,733,000.00	66,597,000.00
177	KESAMBEN	WATUDAKON	72,957,000.00	8,206,000.00	81,163,000.00
178	KESAMBEN	CARANGREJO	68,330,000.00	7,685,000.00	76,015,000.00
179	KESAMBEN	JOMBOK	82,499,000.00	9,279,000.00	91,778,000.00
180	KESAMBEN	BLIMBING	64,148,000.00	7,215,000.00	71,363,000.00
181	KESAMBEN	WULUH	63,415,000.00	7,132,000.00	70,547,000.00
182	KESAMBEN	POJOKREJO	75,321,000.00	8,471,000.00	83,792,000.00
183	KESAMBEN	KESAMBEN	65,742,000.00	7,394,000.00	73,136,000.00
184	KESAMBEN	PODOROTO	71,691,000.00	8,063,000.00	79,754,000.00
185	KESAMBEN	JOMBATAN	77,892,000.00	8,761,000.00	86,653,000.00
186	KESAMBEN	POJOKKULON	58,949,000.00	6,630,000.00	65,579,000.00
187	KESAMBEN	GUMULAN	54,800,000.00	6,163,000.00	60,963,000.00
188	KESAMBEN	JATIDUWUR	55,135,000.00	6,201,000.00	61,336,000.00
189	TEMBELANG	MOJOKRAPAK	75,567,000.00	8,499,000.00	84,066,000.00
190	TEMBELANG	PESANTREN	56,567,000.00	6,362,000.00	62,929,000.00
191	TEMBELANG	TAMPINGMOJO	59,046,000.00	6,641,000.00	65,687,000.00
192	TEMBELANG	KALIKEJAMBON	54,490,000.00	6,129,000.00	60,619,000.00
193	TEMBELANG	KEDUNGLOSARI	60,461,000.00	6,800,000.00	67,261,000.00
194	TEMBELANG	KEDUNGOTOK	60,720,000.00	6,829,000.00	67,549,000.00
195	TEMBELANG	TEMBELANG	55,968,000.00	6,295,000.00	62,263,000.00
196	TEMBELANG	SENTUL	58,819,000.00	6,615,000.00	65,434,000.00
197	TEMBELANG	GABUSBANARAN	47,595,000.00	5,353,000.00	52,948,000.00
198	TEMBELANG	PULOREJO	57,488,000.00	6,466,000.00	63,954,000.00
199	TEMBELANG	REJOSOPINGGIR	69,072,000.00	7,769,000.00	76,841,000.00
200	TEMBELANG	JATIWATES	64,678,000.00	7,275,000.00	71,953,000.00
201	TEMBELANG	KEPUHDOKO	51,764,000.00	5,822,000.00	57,586,000.00
202	TEMBELANG	PULOGEDANG	55,995,000.00	6,298,000.00	62,293,000.00
203	TEMBELANG	BEDAHLAWAK	48,037,000.00	5,403,000.00	53,440,000.00

204	PLOSO	TANGGUNGKRAMAT	57,148,000.00	6,428,000.00	63,576,000.00
205	PLOSO	REJOAGUNG	67,505,000.00	7,592,000.00	75,097,000.00
206	PLOSO	LOSARI	48,645,000.00	5,471,000.00	54,116,000.00
207	PLOSO	PLOSO	55,537,000.00	6,246,000.00	61,783,000.00
208	PLOSO	JATIGEDONG	68,676,000.00	7,724,000.00	76,400,000.00
209	PLOSO	DADITUNGGAL	46,203,000.00	5,197,000.00	51,400,000.00
210	PLOSO	KEDUNGOMBO	48,226,000.00	5,424,000.00	53,650,000.00
211	PLOSO	JATIBANJAR	58,475,000.00	6,577,000.00	65,052,000.00
212	PLOSO	PAGERTANJUNG	50,284,000.00	5,655,000.00	55,939,000.00
213	PLOSO	PANDANBOLE	43,078,000.00	4,845,000.00	47,923,000.00
214	PLOSO	KEDUNGOWO	49,787,000.00	5,600,000.00	55,387,000.00
215	PLOSO	KEBONAGUNG	45,976,000.00	5,171,000.00	51,147,000.00
216	PLOSO	BAWANGAN	46,711,000.00	5,254,000.00	51,965,000.00
217	PLANDAAN	KLITIH	52,227,000.00	5,874,000.00	58,101,000.00
218	PLANDAAN	PLABUHAN	51,513,000.00	5,794,000.00	57,307,000.00
219	PLANDAAN	KAMPUNGBARU	51,361,000.00	5,777,000.00	57,138,000.00
220	PLANDAAN	GEBANGBUNDER	53,650,000.00	6,034,000.00	59,684,000.00
221	PLANDAAN	JATIMLEREK	53,480,000.00	6,015,000.00	59,495,000.00
222	PLANDAAN	KARANGMOJO	61,162,000.00	6,879,000.00	68,041,000.00
223	PLANDAAN	PLANDAAN	53,859,000.00	6,058,000.00	59,917,000.00
224	PLANDAAN	BANGSRI	56,338,000.00	6,337,000.00	62,675,000.00
225	PLANDAAN	PURISEMANDING	67,665,000.00	7,610,000.00	75,275,000.00
226	PLANDAAN	TONDOWULAN	53,981,000.00	6,071,000.00	60,052,000.00
227	PLANDAAN	DARUREJO	67,666,000.00	7,611,000.00	75,277,000.00
228	PLANDAAN	SUMBERJO	51,714,000.00	5,816,000.00	57,530,000.00
229	PLANDAAN	JIPORAPAH	43,018,000.00	4,838,000.00	47,856,000.00
230	KABUH	MARMOYO	40,691,000.00	4,577,000.00	45,268,000.00
231	KABUH	TANJUNGWADUNG	51,241,000.00	5,763,000.00	57,004,000.00
232	KABUH	MANGUNAN	56,968,000.00	6,407,000.00	63,375,000.00
233	KABUH	KABUH	52,947,000.00	5,955,000.00	58,902,000.00
234	KABUH	KEDUNGJATI	62,012,000.00	6,975,000.00	68,987,000.00
235	KABUH	BANJARDOWO	66,989,000.00	7,534,000.00	74,523,000.00
236	KABUH	KARANGPAKIS	54,431,000.00	6,122,000.00	60,553,000.00
237	KABUH	SUMBERINGIN	48,651,000.00	5,472,000.00	54,123,000.00
238	KABUH	SUMBERGONDANG	55,405,000.00	6,232,000.00	61,637,000.00
239	KABUH	KAUMAN	51,870,000.00	5,834,000.00	57,704,000.00
240	KABUH	MUNUNGKEREK	48,119,000.00	5,412,000.00	53,531,000.00
241	KABUH	GENENGANJASEM	49,372,000.00	5,553,000.00	54,925,000.00
242	KABUH	MANDURO	54,874,000.00	6,172,000.00	61,046,000.00
243	KABUH	SUKODADI	56,886,000.00	6,398,000.00	63,284,000.00
244	KABUH	PENGAMPON	51,931,000.00	5,841,000.00	57,772,000.00
245	KABUH	SUMBERAJI	42,854,000.00	4,820,000.00	47,674,000.00
246	KUDU	SIDOKATON	50,296,000.00	5,657,000.00	55,953,000.00
247	KUDU	TAPEN	52,708,000.00	5,928,000.00	58,636,000.00
248	KUDU	BAKALANRAYUNG	56,424,000.00	6,346,000.00	62,770,000.00
249	KUDU	RANDUWATANG	49,639,000.00	5,583,000.00	55,222,000.00
250	KUDU	SUMBERTEGUH	55,674,000.00	6,262,000.00	61,936,000.00
251	KUDU	MENTURUS	47,828,000.00	5,379,000.00	53,207,000.00
252	KUDU	KUDUBANJAR	55,883,000.00	6,285,000.00	62,168,000.00
253	KUDU	MADE	46,196,000.00	5,196,000.00	51,392,000.00
254	KUDU	KEPUHREJO	53,703,000.00	6,040,000.00	59,743,000.00
255	KUDU	BENDUNGAN	50,514,000.00	5,681,000.00	56,195,000.00
256	KUDU	KATEMAS	60,917,000.00	6,852,000.00	67,769,000.00

257	BANDAR KEDUNGMULYO	BANDAR KEDUNGMULYO	59,237,000.00	6,663,000.00	65,900,000.00
258	BANDAR KEDUNGMULYO	MOJOKAMBANG	50,090,000.00	5,634,000.00	55,724,000.00
259	BANDAR KEDUNGMULYO	BARONGSAWAHAN	56,814,000.00	6,390,000.00	63,204,000.00
260	BANDAR KEDUNGMULYO	KAYEN	73,010,000.00	8,212,000.00	81,222,000.00
261	BANDAR KEDUNGMULYO	GONDANGMANIS	57,575,000.00	6,476,000.00	64,051,000.00
262	BANDAR KEDUNGMULYO	BRODOT	56,690,000.00	6,376,000.00	63,066,000.00
263	BANDAR KEDUNGMULYO	PUCANGSIMO	67,826,000.00	7,628,000.00	75,454,000.00
264	BANDAR KEDUNGMULYO	BANJARSARI	56,005,000.00	6,299,000.00	62,304,000.00
265	BANDAR KEDUNGMULYO	BRANGKAL	68,617,000.00	7,718,000.00	76,335,000.00
266	BANDAR KEDUNGMULYO	KARANGDAGANGAN	65,069,000.00	7,318,000.00	72,387,000.00
267	BANDAR KEDUNGMULYO	TINGGAR	66,623,000.00	7,493,000.00	74,116,000.00
268	JOGOROTO	JOGOROTO	88,064,000.00	9,905,000.00	97,969,000.00
269	JOGOROTO	JARAKKULON	52,235,000.00	5,875,000.00	58,110,000.00
270	JOGOROTO	ALANG- ALANGCARUBAN	60,417,000.00	6,795,000.00	67,212,000.00
271	JOGOROTO	SUKOSARI	60,001,000.00	6,748,000.00	66,749,000.00
272	JOGOROTO	SAWIJI	60,857,000.00	6,845,000.00	67,702,000.00
273	JOGOROTO	MAYANGAN	67,141,000.00	7,551,000.00	74,692,000.00
274	JOGOROTO	SUMBERMULYO	74,409,000.00	8,369,000.00	82,778,000.00
275	JOGOROTO	NGUMPUL	66,875,000.00	7,522,000.00	74,397,000.00
276	JOGOROTO	TAMBAR	50,815,000.00	5,715,000.00	56,530,000.00
277	JOGOROTO	JANTI	57,064,000.00	6,418,000.00	63,482,000.00
278	JOGOROTO	SAMBIREJO	60,920,000.00	6,852,000.00	67,772,000.00
279	MEGALUH	TURIPINGGIR	59,137,000.00	6,651,000.00	65,788,000.00
280	MEGALUH	GONGSENG	67,112,000.00	7,548,000.00	74,660,000.00
281	MEGALUH	MEGALUH	59,435,000.00	6,685,000.00	66,120,000.00
282	MEGALUH	SUDIMORO	61,127,000.00	6,875,000.00	68,002,000.00
283	MEGALUH	BALONGSARI	64,993,000.00	7,310,000.00	72,303,000.00
284	MEGALUH	SUMBERSARI	56,126,000.00	6,313,000.00	62,439,000.00
285	MEGALUH	NGOGRI	69,349,000.00	7,800,000.00	77,149,000.00
286	MEGALUH	SIDOMULYO	62,493,000.00	7,029,000.00	69,522,000.00
287	MEGALUH	BALONGGEMEK	52,137,000.00	5,864,000.00	58,001,000.00
288	MEGALUH	DUKUHARUM	49,133,000.00	5,526,000.00	54,659,000.00
289	MEGALUH	SUMBERAGUNG	58,788,000.00	6,612,000.00	65,400,000.00
290	MEGALUH	PACARPELUK	50,959,000.00	5,731,000.00	56,690,000.00
291	MEGALUH	KEDUNGREJO	54,139,000.00	6,089,000.00	60,228,000.00
292	NGUSIKAN	KETAPANGKUNING	50,288,000.00	5,656,000.00	55,944,000.00
293	NGUSIKAN	KEBOAN	55,611,000.00	6,255,000.00	61,866,000.00
294	NGUSIKAN	KEDUNGBOGO	50,686,000.00	5,701,000.00	56,387,000.00
295	NGUSIKAN	NGUSIKAN	57,397,000.00	6,456,000.00	63,853,000.00
296	NGUSIKAN	SUMBERNONGKO	57,334,000.00	6,448,000.00	63,782,000.00
297	NGUSIKAN	CUPAK	38,544,000.00	4,335,000.00	42,879,000.00
298	NGUSIKAN	MANUNGGAL	48,563,000.00	5,462,000.00	54,025,000.00
299	NGUSIKAN	NGAMPEL	41,763,000.00	4,697,000.00	46,460,000.00

300	NGUSIKAN	MOJODANU	41,544,000.00	4,672,000.00	46,216,000.00
301	NGUSIKAN	KROMONG	37,771,000.00	4,248,000.00	42,019,000.00
302	NGUSIKAN	ASEMGEDE	37,801,314.00	4,207,010.00	42,008,324.00
<b>JUMLAH</b>			<b>18,138,480,314.00</b>	<b>2,040,075,010.00</b>	<b>20,178,555,324.00</b>

Pj.BUPATI JOMBANG,

ttd

SUGIAT